



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR-RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)**

Rapat Ke	: 11
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / ke- 11
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 30 Januari 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. M. Ali Taher, S.H., M.Hum
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2016; 2. Isu-isu aktual.
Hadir	: 1. orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI 2. Menteri Agama RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 251 ayat (2), Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dipimpin oleh **Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Komisi VIII DPR RI sesuai acara tersebut diatas.

3. Rapat Kerja VIII DPR RI dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan paparan oleh Menteri Agama RI dan tanya jawab oleh anggota Komisi VIII DPR RI.
4. Rapat di skors pukul 14.10 WIB dan dibuka kembali oleh Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, serta dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Jawaban dari Menteri Agama RI serta tanggapan Anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI **belum dapat menerima** laporan pelaksanaan APBN Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2016 dengan realisasi sebesar 93,55% atau sebesar Rp53.034.763.674.582,00 (*lima puluh tiga triliun tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*) dari total pagu sebesar Rp56.689.137.331.000,00 (*lima puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan pejabat eselon I Kementerian Agama RI.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mempertimbangkan pemberian anggaran yang memadai untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keagamaan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sehingga anggaran yang direncanakan dapat terserap lebih maksimal dan mampu memenuhi program prioritas, seperti penyelesaian Tunjangan Profesi Guru dan Inpassing yang terhutang.

- c. Memperbaiki mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk (PNBP-NR).
3. Dalam menyikapi potensi disintegrasi bangsa antara lain masalah intoleransi, Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk tampil lebih intensif dan bijak serta mengayomi secara adil terhadap seluruh umat beragama.
4. Mengingat permasalahan keagamaan yang semakin kompleks dan memerlukan peran yang lebih maksimal dari Kementerian Agama RI, khususnya fungsi keagamaan maka diperlukan bentuk dukungan anggaran yang memadai.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

Ttd.

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum